BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada sepuluh tahun belakang terdapat beberapa kasus *fraud* laporan keuangan pada proses pengajuan kredit yang kemudian pada perjalanan kreditnya menyebabkan kredit macet. Pada kasus pertama yaitu dilakukan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang merupakan perusahaan pembiayaan, anak usaha Columbia Group, terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dengan membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Tindakan ini menyebabkan kredit macet dan kerugian bagi para kreditur sekitar 14 bank sebagai kreditur dengan jaminan Rp2,2 triliun, serta 336 pemegang MTN senilai Rp1,85 triliun¹. Sama halnya dengan kasus sebelumnya, kasus PT. Tirta Amarta Botling (TAB) dengan Bank Mandiri yang melibatkan manipulasi laporan keuangan, di mana data aset PT. TAB dilaporkan lebih besar dari kondisi sebenarnya untuk memperoleh tambahan fasilitas kredit². Sehingga Bank Mandiri mengalami kerugian akibat adanya penggelembungan laporan keuangan tersebut.

Kasus serupa juga terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) atau TPS Food, yang bergerak di industri consumer goods. Skandal ini bermula ketika anak perusahaannya, PT Indo Beras Unggul (IBU), diduga mengepul beras

¹ CNN Indonesia, “Kronologi SNP Finance dari 'Tukang Kredit' ke 'Tukang Bobol'”. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926143029-78-333372/kronologi-snp-finance-dari-tukang-kredit-ke-tukang-bobol>, diakses pada 18 Maret 2025

² Kontan, “Kasus TAB, debitur Mandiri diduga manipulasi data” <https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-tab-debitur-mandiri-diduga-manipulasi-data>, diakses pada 25 Februari 2025

subsidi petani dan mengemasnya ulang menjadi beras premium untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Akibat kasus ini, saham AISA anjlok secara drastis, memicu upaya manipulasi laporan keuangan pada tahun 2017 guna menjaga kepercayaan investor. Dengan laporan keuangan yang telah dimanipulasi, perusahaan telah menyebabkan kerugian pemegang obligasi yang mulai dari pensiunan sampai bank-bank besar itu jika ditotal bisa lebih dari Rp1 triliun³, meskipun kondisi keuangan sebenarnya tidak sehat. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik keuangan perusahaan serta perlunya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas kredit di sektor perbankan dan pembiayaan.⁴

Beberapa kasus tersebut mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), yang merupakan fondasi utama dalam pengelolaan risiko perbankan. Prinsip ini mewajibkan bank untuk menerapkan sistem mitigasi risiko yang ketat dalam menilai kelayakan kredit debitur. Namun, lemahnya pengawasan dan ketidaktepatan dalam proses *due diligence* justru memperbesar risiko kredit macet. Penelitian sebelumnya oleh Kurniawati menunjukkan bahwa *fraud* dalam perbankan sering kali berkaitan dengan lemahnya pengawasan internal serta adanya celah dalam sistem perbankan yang memungkinkan terjadinya manipulasi

³ Harian Ekonomi Neraca, "FORSA: Kasus AISA Merupakan Kejahatan Pidana Pasar Modal" <https://www.neraca.co.id/article/147105/forsa-kasus-aisa-merupakan-kejahatan-pidana-pasar-modal>, diakses pada 07 Maret 2025

⁴ Binus, "Kasus Fraud PT. Tiga Pilar Sejahtera". <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/27/kasus-fraud-pt-tiga-pilar-sejahtera-masalah-fraud/>, diakses pada 26 Februari 2025

laporan keuangan.⁵ Kondisi ini semakin diperparah dengan kecenderungan bank untuk lebih fokus pada pertumbuhan kredit tanpa memperhatikan kualitas dan validitas laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar analisis kredit.⁶

Fraud dalam perbankan merupakan masalah sistemik yang dapat berdampak luas pada industri keuangan secara keseluruhan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Wibisono mengungkapkan bahwa kasus *fraud* dalam perbankan sering kali melibatkan berbagai modus, seperti pemalsuan dokumen kredit, kolusi dengan pihak internal bank, hingga pencairan kredit fiktif.⁷ Salah satu penyebab utama terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan adalah tekanan untuk memenuhi target keuangan yang tinggi, adanya peluang yang tercipta akibat lemahnya sistem pengendalian internal, serta rasionalisasi yang dilakukan oleh pelaku sebagai justifikasi atas tindakan mereka.⁸ Dalam konteks perbankan di Indonesia, *fraud* sering kali dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan serta adanya

⁵ Kurniawati, A. D, “Red Flags to Detect Fraudulent Financial Reporting in Indonesian Banking Sector”, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 175, 2021, hal. 320 [10.2991/aebmr.k.210510.049](https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210510.049)

⁶ Shonhadji, Nanang & Irwandi, Soni. “Fraud prevention in the Indonesian banking sector using anti-fraud strategy”, *Banks and Bank Systems*, Vol. 19, 2024, hal. 15 19. 12 - 23. 10.21511/bbs.19(1).2024.02.

⁷ Wibisono, W, “Preliminary Study on Corruption Case in the Indonesian Banking Sector: Overview of the Fraudster, Loss, and Fraud Modes”, *Asia Pacific Fraud Journal*, Vol. 8, 2023, hal. 37 <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.263>

⁸ Afrida, Anggreli & Djuniar, Lis & Ketriona, Ketriona & Yuliachtri, Saekarini, “Determinants of the Fraud Triangle in Detecting Fraudulent Financial Reporting in Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange”, *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, Vol. 6, 2023, hal. 211 06. 10.47191/ijmra/v6-i1-25.

celah dalam regulasi yang belum secara tegas mengatur sanksi terhadap debitur yang melakukan manipulasi laporan keuangan.⁹

Tidak hanya itu, meningkatnya kompleksitas sistem keuangan serta pesatnya digitalisasi dalam sektor perbankan juga turut membuka peluang baru bagi pelaku *fraud*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan tahunannya mencatat bahwa pada tahun 2023, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di sektor perbankan mengalami peningkatan menjadi 11,49%, dengan nilai kredit macet yang mencapai Rp11 triliun.¹⁰ Angka ini mengindikasikan adanya peningkatan risiko gagal bayar yang sebagian besar disebabkan oleh *fraud* dalam proses kredit. Data ini diperkuat dengan studi yang dilakukan oleh Reschiwati, yang menyebutkan bahwa sistem pengawasan internal yang lemah menjadi faktor utama yang menyebabkan bank gagal mendeteksi adanya laporan keuangan yang dimanipulasi oleh debitur.¹¹

Dampak dari *fraud* laporan keuangan tidak hanya terbatas pada kerugian finansial yang dialami oleh bank, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berimplikasi pada meningkatnya risiko sistemik di sektor keuangan,

⁹ Handoko, Bambang & Tandean, Dessy, "An Analysis of Fraud Hexagon in Detecting Financial Statement Fraud (Empirical Study of Listed Banking Companies on Indonesia Stock Exchange for Period 2017 – 2019)", ICEBA 2021: 2021 7th International Conference on E-Business and Applications, 2021, hal. 98 10.1145/3457640.3457657.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Laporan perkembangan kredit perbankan di Indonesia", 2023, hal. 76

¹¹ Reschiwati, Putri, M. D., & Anwar, C, "Fraud prevention in the banking sector in Indonesia: What's relating?", Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Vol. 8, 2021, hal. 13716

yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian secara keseluruhan.¹² Oleh karena itu, industri perbankan perlu memperkuat sistem mitigasi risiko dengan mengembangkan strategi anti-*fraud* yang lebih efektif, meningkatkan transparansi dalam proses analisis kredit, serta memastikan bahwa sistem pengawasan internal mampu mendeteksi potensi *fraud* sejak dini. Selain itu, penerapan regulasi yang lebih ketat dalam proses *due diligence* serta penguatan sanksi hukum terhadap pelaku *fraud* juga menjadi langkah yang sangat penting dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.¹³

Kasus *fraud* laporan keuangan dalam kredit macet yang terjadi pada beberapa kasus tersebut mengungkapkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem manajemen risiko perbankan di Indonesia. Penerapan prinsip kehati-hatian yang tidak optimal, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya ketegasan dalam regulasi menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya *fraud* dalam proses kredit. Dalam industri perbankan sendiri, OJK selaku otoritas telah mengeluarkan beberapa ketentuan yang terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan

¹² Sunarto, F. W., & Riantono, I. E, *Internal auditors' perceptions of factors influencing the effectiveness of fraud risk management in the Indonesian banking sector*. (New York: Association for Computing Machinery, 2022), hal. 61 <https://doi.org/10.1145/3535782.3535791>

¹³ Prayudi, R, "Settlement mechanism of banking fraud and the role of the Financial Services Authority in Indonesia", *International Journal of Social Science and Humanities Research*, Vol. 4, 2021, hal. 1335

Kebijakan Perkreditan Bank dimana Bank diharuskan untuk memiliki kebijakan perkreditan yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan yang sehat dan menguntungkan bagi Bank dengan mempertimbangkan manajemen risiko. Namun beberapa kasus diatas mencerminkan kegagalan dalam penerapan manajemen risiko, yang menyebabkan bank menghadapi peningkatan risiko kredit macet, audit akibat kelalaian dalam *due diligence*, serta potensi penurunan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, beberapa kasus diatas menjadi pelajaran penting bagi industri perbankan untuk memperkuat sistem mitigasi risiko, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan keakuratan data debitur sebelum menyetujui fasilitas kredit.

Fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan tidak hanya menjadi masalah di sektor perusahaan konvensional, tetapi juga telah merambah ke sektor *financial technology (fintech)* yang kini berkembang pesat di Indonesia. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena pelaku *fraud* tidak terbatas pada entitas perusahaan saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh debitur individu. Dalam konteks ini, debitur individu dapat melakukan kecurangan melalui pemalsuan data identitas, penghasilan, atau laporan keuangan pribadi dalam rangka memperoleh pembiayaan dari perbankan. Seiring dengan kemudahan akses digital, sejumlah individu memanfaatkan celah dalam sistem verifikasi dan penilaian kredit (*credit scoring*) untuk mengajukan pinjaman secara tidak jujur. Akan tetapi, dibandingkan dengan debitur individu, debitur perusahaan jauh lebih berisiko karena skala pembiayaan yang diajukan cenderung lebih

besar, struktur keuangan yang lebih kompleks, serta adanya kemungkinan kolusi antar pemangku kepentingan internal dalam perusahaan untuk merekayasa laporan keuangan. Sebagaimana yang dilaporkan oleh *Association of Certified Fraud Examiner* pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa skema kecurangan laporan keuangan atau menyebabkan salah saji material atau penghilangan dalam laporan keuangan organisasi, adalah yang paling jarang (9%) tetapi paling mahal, dengan kerugian ekuivalen dengan \$593.000 per kasus¹⁴. Hal ini memperbesar potensi kerugian bagi bank jika proses verifikasi dan analisis kredit tidak dilakukan secara menyeluruh.

Salah satu kasus terbaru yang mencerminkan celah dalam sistem pengawasan keuangan adalah dugaan pemalsuan laporan keuangan oleh e-Fishery untuk memperoleh pendanaan dari beberapa bank. Perusahaan ini diduga mendapatkan pinjaman dari tiga bank dengan nilai yang cukup besar melalui manipulasi dokumen pendukung, seperti invoice, kontrak, serta laporan keuangan fiktif. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ilusi bahwa e-Fishery memiliki kondisi keuangan yang sehat dan berdaya tahan tinggi, sehingga meningkatkan peluang persetujuan pinjaman dari bank. Namun, ketika realitas finansial perusahaan tidak sesuai dengan data yang disajikan dan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban kredit mulai terungkap,

¹⁴ ACFE, *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*, (Austin: ACFE, 2023), hal. 9

risiko kredit macet pun meningkat, menyebabkan bank mengalami potensi wanprestasi dan kerugian finansial yang besar.¹⁵

Dampak dari *fraud* yang dilakukan oleh e-Fishery tidak hanya terbatas pada aspek perbankan, tetapi juga berimbas pada sektor tenaga kerja dan ekonomi secara lebih luas. Ketidakstabilan keuangan yang dialami perusahaan ini memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar, yang mengindikasikan adanya efek domino akibat *fraud* terhadap keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Tidak hanya itu, kasus ini juga menjadi peringatan bagi industri perbankan dan *fintech* tentang pentingnya meningkatkan pengawasan terhadap validitas laporan keuangan dan dokumen pendukung dalam proses persetujuan kredit. Mengingat semakin kompleksnya modus *fraud* yang melibatkan teknologi dan dokumen elektronik, diperlukan sistem pengawasan yang lebih canggih serta regulasi yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas kredit. Otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), perlu mengadopsi pendekatan berbasis teknologi dalam mitigasi risiko *fraud* guna memastikan bahwa sistem keuangan tetap stabil dan kredibel. Oleh karena itu, kasus e-Fishery menjadi momentum penting bagi sektor keuangan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi, serta menyesuaikan kebijakan agar mampu mengantisipasi dan menangani *fraud* eksternal secara lebih efektif.

¹⁵ CNBC Indonesia, “Fraud Sistemik efishery dan yang Terlibat di Dalamnya”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250201120230-4-607187/fraud-sistemik-efishery-dan-yang-terlibat-di-dalamnya>, diakses pada 24 Februari 2025

Berdasarkan survei *fraud* Indonesia pada tahun 2019 bahwa kasus *fraud* di Indonesia dengan total 239 kasus yang terbagi dalam tiga kategori utama: korupsi (167 kasus), penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan (50 kasus), serta *fraud* laporan keuangan (22 kasus). Total kerugian akibat *fraud* mencapai Rp873,43 miliar dengan rata-rata kerugian per kasus sebesar Rp7,25 miliar, dan 38,5% dari kasus memiliki kerugian lebih dari Rp1 miliar. Korupsi merupakan kasus *fraud* yang paling dominan dengan total kerugian Rp373,65 miliar dan tingkat kejadian 69,9%, disusul penyalahgunaan aset dengan kerugian Rp257,52 miliar (20,9%), serta *fraud* laporan keuangan dengan kerugian Rp242,26 miliar (9,2%). Selain itu, durasi pengungkapan *fraud* yang paling umum terjadi adalah dalam rentang waktu 12 bulan atau kurang.¹⁶

Selain sektor perbankan, industri *fintech* juga menghadapi tantangan terkait *fraud*. Pada 2022, OJK menerima 13.229 laporan pengaduan terkait *fintech*, dengan 3.294 di antaranya berkaitan dengan *fraud*. Sementara itu, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) pada 2021 mencatat 380 kasus *fraud* dengan total kerugian mencapai Rp58,6 miliar.¹⁷ Data ini menunjukkan bahwa meskipun *fintech* berkembang pesat, risiko penipuan masih menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan ketat dari otoritas terkait.

Fraud atau kecurangan biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak

¹⁶ ACFE, *Survei Fraud Indonesia 2019*, (Jakarta: ACFE, 2019), hal. 18

¹⁷OJK, *Panduan strategi anti-fraud ITSK*, (Jakarta: OJK, 2024), hal. 3

sah dengan mengorbankan pihak lain. Alasan utama seseorang melakukan *fraud* sering kali terkait dengan *fraud triangle*, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan dapat berasal dari kebutuhan finansial, seperti utang atau gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan. Peluang muncul karena lemahnya sistem pengawasan atau kontrol, sehingga memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. Sementara itu, rasionalisasi adalah pembenaran moral yang digunakan pelaku untuk meyakinkan diri bahwa tindakannya tidak salah atau dapat diterima.

Fraud dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki akses dan kesempatan, baik dari dalam maupun luar suatu organisasi. Dalam konteks perbankan, *fraud* dapat dilakukan oleh karyawan bank yang menyalahgunakan kepercayaan untuk memanipulasi data, mencuri dana, atau memberikan fasilitas kredit kepada pihak yang tidak memenuhi syarat. Di sisi lain, nasabah atau pihak eksternal juga dapat menjadi pelaku *fraud*, misalnya dengan memalsukan dokumen untuk mendapatkan kredit atau melakukan tindakan manipulatif lainnya untuk keuntungan pribadi. Selain itu, kolusi antara karyawan dan pihak eksternal sering menjadi bentuk *fraud* yang sulit dideteksi karena melibatkan kerjasama terencana.

Selain berasal dari kelemahan sistem pengawasan dan manajemen risiko, *fraud* dalam perbankan juga sering kali melibatkan berbagai tingkat jabatan di dalam institusi keuangan. Tidak hanya dilakukan oleh individu pada level operasional, *fraud* juga dapat terjadi di tingkat manajemen puncak

yang memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan keuangan. Ketika *fraud* dilakukan oleh pihak eksekutif, dampaknya bisa lebih luas karena mereka memiliki akses terhadap sistem keuangan dan dapat memanfaatkan kelemahan prosedural untuk menyembunyikan tindakan manipulatif. Lebih dari itu, skema *fraud* sering kali melibatkan kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti auditor independen, konsultan keuangan, atau vendor, yang dapat memperumit deteksi dan penanganannya.¹⁸

Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa *fraud* yang melibatkan oknum di dalam organisasi perbankan terus berkembang dengan metode yang semakin canggih dan terstruktur.¹⁹ Oleh karena itu, selain mengoptimalkan regulasi yang mengikat secara hukum, perbankan perlu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas manajemen, serta menerapkan kebijakan deteksi dini. Penguatan integritas dalam budaya organisasi juga menjadi aspek kunci untuk mencegah *fraud* dari dalam lembaga keuangan itu sendiri. Dengan pendekatan yang lebih ketat dan sistematis, industri perbankan diharapkan mampu mengurangi risiko *fraud* yang tidak hanya merugikan lembaga keuangan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sektor keuangan nasional.²⁰

¹⁸ Wibisono, W, "Preliminary Study on Corruption Case in the Indonesian Banking Sector: Overview of the Fraudster, Loss, and Fraud Modes", *Asia Pacific Fraud Journal*, Vol. 8, 2023, hal. 37

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan perkembangan kredit perbankan di Indonesia*. 2023 <https://www.ojk.go.id>

²⁰ Sihombing, Kennedy Samuel, and Shiddiq Nur Rahardjo. "Analisis fraud diamond dalam mendeteksi financial statement fraud: studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012." *Disertasi.*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014, hal. 17.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)²¹, *fraud* terbagi menjadi tiga kategori, yaitu individu, internal, dan eksternal. *Fraud* eksternal merupakan bentuk penipuan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu organisasi, seperti bank atau *fintech*. Dengan berkembangnya teknologi, *fraud* eksternal semakin mudah dilakukan, termasuk melalui pemalsuan laporan keuangan, tanda tangan elektronik palsu, serta penggunaan identitas yang tidak sesuai. Hal ini menjadi ancaman serius bagi industri keuangan karena dapat merugikan banyak pihak, termasuk perbankan dan nasabah.

Fraud laporan keuangan yang dilakukan sebelum perjanjian kredit menyebabkan bank salah dalam menilai kelayakan debitur, sehingga ketika kredit diberikan, debitur berpotensi mengalami wanprestasi karena ketidaksesuaian kondisi finansial sebenarnya. Akibatnya, ketika kredit bermasalah atau macet, bank akan diaudit karena dianggap tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam proses analisis kredit. Hal ini berimplikasi pada potensi kerugian finansial yang signifikan bagi bank, termasuk peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) dan kewajiban menyediakan cadangan kerugian kredit. Selain itu, kegagalan bank dalam menilai risiko debitur dapat merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas industri perbankan secara keseluruhan.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang memiliki

²¹ *Op.cit*, hal. 7

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan dana kepada masyarakat bagi yang memerlukan dana dalam bentuk kredit.²² Peran bank sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena bank memiliki peran untuk pengendalian stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, dan pengaturan sistem pembayaran. Dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank, maka risiko yang dihadapi bank akan semakin meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen resiko yang memadai.²³

Bank adalah organisasi keuangan yang fungsi utamanya meliputi pengumpulan uang, penyaluran kredit, dan layanan perbankan lainnya. Kegiatan pendanaan, yaitu kegiatan bank untuk menghimpun atau mencari uang dengan cara membelinya dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, juga dikenal sebagai kegiatan bank dalam industri perbankan. Kegiatan pokok dari bank selanjutnya adalah menyalurkan kembali dana yang sudah didapatkan dari kegiatan penghimpunan uang kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Kegiatan menyalurkan dana ini di dalam dunia Bank adalah organisasi keuangan yang fungsi utamanya meliputi pengumpulan uang, penyaluran kredit, dan layanan perbankan lainnya.²⁴ Kegiatan pendanaan, yaitu kegiatan bank untuk menghimpun atau mencari

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 22

²³ Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 4.

²⁴ Ardhansyah Putra Hrp, Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hal. 33.

uang dengan cara membelinya dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, juga dikenal sebagai kegiatan bank dalam industri perbankan.

Kegiatan pokok dari bank selanjutnya adalah menyalurkan kembali dana yang sudah didapatkan dari kegiatan penghimpunan uang kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Kegiatan menyalurkan dana ini di dalam dunia.²⁵ Dari ketiga kegiatan pokok perbankan tersebut, kegiatan menyalurkan dana melalui kredit menduduki posisi paling utama, karena penting untuk diingat bahwa, dalam pandangan operasi bisnis bank, pinjaman adalah kegiatan yang paling banyak menghasilkan keuntungan dan uang.²⁶

Di Indonesia lembaga keuangan memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim. Bank dituntut untuk berperan sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²⁷ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadikan tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang – Undang No. 7 tahun 1992

²⁵ Ardiansyah Putra Hrp, Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hal. 33.

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 71.

²⁷ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hal, 14.

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11,4 persen secara tahunan atau mencapai Rp7.508 triliun per Agustus 2024, namun mengalami perlambatan dibandingkan Juli 2024 yang mencapai 12,4 persen.²⁸ Perlambatan ini mengindikasikan tekanan dalam sektor perbankan akibat meningkatnya risiko kredit dan kondisi makroekonomi yang memengaruhi daya beli serta investasi masyarakat. Selain itu, rasio kredit bermasalah (NPL) per Juli 2024 meningkat menjadi 11,49 persen dengan nilai NPL mencapai Rp16,71 triliun. Kredit macet juga mengalami lonjakan hingga 25,12 persen, mencapai Rp11 triliun, yang menunjukkan peningkatan risiko gagal bayar dan memburuknya kualitas kredit. Sebagai respons, OJK mencabut izin usaha 15 bank yang tidak mampu memenuhi standar keuangan dan pengelolaan risiko guna menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi kepentingan nasabah.²⁹

²⁸ Antara, “OJK catat pertumbuhan kredit perbankan 11,4 persen per Agustus 2024”, <https://www.antaraneews.com/berita/4368787/ojk-catat-pertumbuhan-kredit-perbankan-114-persen-per-agustus-2024> diakses pada 24 Februari 2025

²⁹ Bisnis Indonesia, “Kredit Bermasalah (NPL) BPR Tembus 11,49% per Juli 2024, Ini Penyebabnya”, <https://finansial.bisnis.com/read/20240922/90/1801388/kredit-bermasalah-npl-bpr-tembus-1149-per-juli-2024-ini-penyebabnya>, diakses pada 24 Februari 2025

Peristiwa *fraud* melanggar asas kepercayaan (*fiduciary principle*), yang merupakan fondasi utama dalam hubungan hukum dan bisnis, terutama di sektor perbankan dan keuangan. Asas ini menuntut setiap pihak yang terlibat untuk bertindak dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban atau perjanjian yang telah disepakati. Dalam kasus *fraud*, pelaku mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain, baik melalui penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, maupun tindakan curang lainnya untuk keuntungan pribadi. Pelanggaran terhadap asas kepercayaan ini tidak hanya merugikan pihak yang dirugikan secara finansial, tetapi juga mencederai integritas sistem hukum dan keadilan. Dampaknya meluas, mencakup kerusakan reputasi institusi, hilangnya kepercayaan publik, dan potensi instabilitas dalam ekosistem bisnis atau perbankan.

Dalam hal terjadi *fraud* yang dilakukan oleh nasabah, Bank cenderung hanya menempuh jalur pidana dengan melaporkan nasabah, melihat kerugian yang dialami begitu besar bank sering kali tidak menggunakan jalur perdata yang memungkinkan bank untuk menuntut ganti rugi, padahal semestinya bank mendahulukan upaya perdata agar mendapatkan ganti kerugian. Dalam konteks hukum perdata, tindakan *fraud* yang dilakukan nasabah, seperti manipulasi laporan keuangan untuk memperoleh kredit, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Selain itu,

jika nasabah mengalami kredit macet akibat *fraud*, bank juga dapat menggugat berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, yang mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi, mencakup kerugian materiil maupun immateriil. Dengan demikian, kurangnya optimalisasi mekanisme hukum perdata oleh bank dalam menangani kasus *fraud*, yang seharusnya tidak hanya difokuskan pada sanksi pidana, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian melalui jalur perdata.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR ATAS WANPRESTASI AKIBAT *FRAUD* DALAM PROSES KREDIT DI PERBANKAN”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian kredit yang dalam proses pengajuannya terbukti terdapat *fraud* ?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum debitur yang melakukan *fraud* dalam proses kredit kepada Bank?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan kejelasan kedudukan hukum perjanjian kredit dalam kasus terjadinya *fraud* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum debitur yang melakukan *fraud* dalam proses kredit.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait analisis hukum terhadap wanprestasi debitur dalam kasus *fraud* di sektor perbankan.
- b. Memberikan referensi literatur akademis dalam bidang hukum perbankan, khususnya mengenai tanggung jawab hukum debitur yang melakukan *fraud* dalam proses kredit.

2 Manfaat Praktis

- a. Menjadi panduan bagi Praktisi Hukum dan Pihak Perbankan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan praktis bagi pengacara, notaris, serta pihak perbankan mengenai mekanisme hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kasus kredit macet akibat manipulasi laporan keuangan.
- b. Memberikan wawasan kepada kreditur mengenai hak-hak hukum yang dapat diambil dalam menghadapi kasus wanprestasi debitur akibat *fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan dari penelitian yang disajikan oleh peneliti secara keseluruhan.

Bab *Kedua*, membahas mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teori pertanggungjawaban hukum, teori kepastian hukum, teori *fraud triangle* serta tinjauan konseptual mengenai *fraud* dalam perbankan.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.³⁰ Bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

Bab *Keempat*, dalam bab ini akan menyajikan hasil temuan penelitian dan analisis yang mendalam. Hasil-hasil tersebut akan diuraikan dan dijabarkan secara sistematis dengan mengaitkan pada teori-teori yang telah dijelaskan dalam Bab II, khususnya teori pertanggungjawaban hukum. Pembahasan juga akan dilengkapi dengan hasil wawancara dari narasumber dan referensi dari buku-buku yang relevan untuk memperkuat analisis.

Bab *Kelima*, adalah bab penutup dalam penulisan Tesis yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995), hal. 5